

**DINAMIKA PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) OLEH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA BEKASI**

TESIS

**Oleh:
SAFARIN NOVARIZAL
NPM: 202320251010**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Dinamika Penanganan Pelanggaran Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) Oleh Badan Pengawasan
Pemilihan Umum (Bawaslu Kota Bekasi)

Nama Mahasiswa : Safarin Novarizal

Nomor Pokok Mahasiswa : 202320251010

Program Studi / Fakultas : Magister Hukum / Hukum

Bekasi, 30 Juli 2025

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A

NIDN.01027038601

Dr. Rahmat Saputra, S.H., M.H

NIDN.0304058306

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Dinamika Penanganan Pelanggaran Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) Oleh Badan Pengawasan
Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekasi
Nama Mahasiswa : Safarin Novarizal
Nomor Pokok Mahasiswa : 202320251010
Program Studi / Fakultas : Magister Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 25 Juli 2025

Bekasi, 30 Juli 2025

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. H. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn
NIDN. 0316097103

Penguji I : Dr. Rahmat Saputra, S.H., M.H.
NIDN. 0304058306

Penguji II : Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H
NIDN. 0328106604

MENYETUJUI,

Ketua Program Studi
Magister Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H
NIDN. 0313046804

Prof. Dr. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum
NIDN. 8976950022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safarin Novarizal

NPM : 202320251010

TTL : Curup, 3 November 1985

Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul “*Dinamika Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekasi*” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 30 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Safarin Novarizal

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safarin Novarizal
NPM : 202320251010
TTL : Curup, 3 November 1985
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Fee Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Dinamika Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekasi”**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/ mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama masih tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 30 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Safarin Novarizal

ABSTRAK

Safarin Novarizal. 202320251010. Dinamika Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekasi.

Dinamika pelaksanaan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Bekasi dalam menangani pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), khususnya terkait dengan penyusunan dan pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya permasalahan dalam DPT, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum terhadap praktik pelanggaran seperti politik uang dan penyalahgunaan data pemilih. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan didukung dengan studi empiris di tingkat lokal. Analisis dilakukan berdasarkan kerangka teori negara hukum, teori pengawasan dan akuntabilitas, serta teori hukum progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAWASLU memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan legitimasi Pilkada, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan kewenangan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta kendala dalam pembuktian pelanggaran. Studi kasus Pilkada Kota Bekasi 2024 menunjukkan bahwa banyak laporan pelanggaran, khususnya terkait politik uang dan DPT, tidak dapat ditindaklanjuti secara hukum karena tidak terpenuhinya unsur formil dan materil. Dari hasil penelitian merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan BAWASLU, perbaikan regulasi pengawasan DPT, serta penggunaan pendekatan progresif dalam penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dan praktis terhadap pengembangan sistem pengawasan Pemilu di Indonesia yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: BAWASLU, Pilkada, DPT, Penegakan Hukum, Hukum Progresif, Pengawasan Pemilu

ABSTRACT

Safarin Novarizal. 202320251010. *The Dynamics of Handling Violations in Regional Head Elections (Pilkada) by the Election Supervisory Agency (Bawaslu) Bekasi City.*

This thesis explores the dynamics of the supervisory function of the Election Supervisory Agency (BAWASLU) of Bekasi City in handling violations during the Regional Head Election (Pilkada), particularly focusing on the monitoring and enforcement related to the Final Voter List (DPT). The study arises from persistent issues such as inaccuracies in the voter list, low voter participation, and weak legal enforcement against electoral violations including vote-buying and data manipulation. This research adopts a normative legal method complemented by empirical analysis at the local level. The study is grounded in the theories of the rule of law, accountability and supervision, as well as progressive legal theory. The findings indicate that while BAWASLU plays a critical role in ensuring electoral integrity and legitimacy, its effectiveness is hampered by limited authority, weak inter-institutional coordination, and difficulties in proving violations. The case study of the 2024 Bekasi City Pilkada reveals that many reported violations especially those concerning vote-buying and voter list discrepancies were not legally pursued due to the lack of sufficient formal and material evidence. This thesis recommends strengthening BAWASLU's institutional capacity, revising voter list oversight regulations, and applying a progressive legal approach focused on achieving substantive justice. The research contributes both theoretically and practically to the improvement of electoral supervision mechanisms in Indonesia, aiming for a more transparent, accountable, and democratic electoral process.

Keywords: BAWASLU, Regional Election, Final Voter List (DPT), Law Enforcement, Progressive Law, Electoral Supervision

PRAKATA

Alhamdulillahirabbil'alamiin... puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang mana tidak ada daya dan upaya yang dapat kita lakukan selain Ridho serta kasih sayang Allah SWT yang senantiasa mengiringi langkah kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan nikmat-Nya yang tiada terhitung banyaknya. Shalawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan pedomannya yang sempurna dan komprehensif.

Tesis ini merupakan tugas akhir bagi para mahasiswa untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar Magister S2 di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Tesis ini berjudul *“Dinamika Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekasi (Studi Kasus DPT Kota Bekasi)”*. Dalam penulisan tesis ini banyak menemukan kesulitan, namun atas berkat Rahmat, Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Tesis ini. Berhasilnya proses penyusunan Tesis ini juga tidak lepas dari bantuan dan tanggung jawab, bimbingan, dan motivasi serta segala bantuan dari mereka, terutama kepada:

1. Orang tua penulis yaitu Ayahanda tercinta Alwi Effendi (alm) dan Ibunda tersayang Muslimah serta terkhusus Ibu mertua Ermi yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan kepada penulis. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada para orang tua penulis agar kelak dapat mendoakan penulis agar berhasil dalam kehidupan ini, di dunia maupun di akhirat.
2. Istri tercinta Rafika Sari, S.Si., M.Si. yang telah ikhlas membantu dan mendukung penulis selama menjalani studi hingga mengerjakan tugas akhir dan mendoakan tiada henti untuk setiap aktivitas yang dijalani.
3. Buah hati tercinta, Ahmad Faishal Hariz, Aisyah Khansa Almahyra dan Althaf Hanan Abdullah sebagai penghibur dan penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan studi, doa yang tiada putus dan harapan yang tiada pernah pupus untuk kalian semua.
4. Kakak dan Adik serta seluruh saudara ipar yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis.
5. Bapak Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Prof. Dr. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Bapak Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H. selaku Ketua program studi S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Bapak/ Ibu Dosen serta staf pegawai prodi S2 Magister Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
9. Bapak Dr. Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A dan Bapak Dr. Rahmat Saputra, S.H., M.H. selaku pembimbing Tesis penulis yang banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan nasihat yang bermanfaat bagi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan rezeki yang baik kepada bapak.
10. Ibu Choirunnisa Marzoeqi S.Psi. selaku Bawaslu Kota Bekasi yang telah memberikan izin serta bantuan kepada penulis selama penelitian ini berlangsung.
11. Untuk sahabat-sahabat saya kelas Bekasi angkatan 2023 prodi S2 Hukum yang sama-sama berjuang dalam penyelesaian studi dan Tesis semoga kita sukses bersama, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat, *Aamin*.

Dengan segala ketulusan hati penulis sampaikan bahwa Tesis ini masih terdapat banyak kerurangan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan Tesis ini. Sehingga kemudian hari dapat terciptanya karya tulis ilmiah yang lebih baik lagi untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti lainnya, *Aamiin Ya Rabbal Alamiin*.

Bekasi, Juli 2025
Penulis

Safarin Novarizal
NPM. 202320251010

DAFTAR ISI

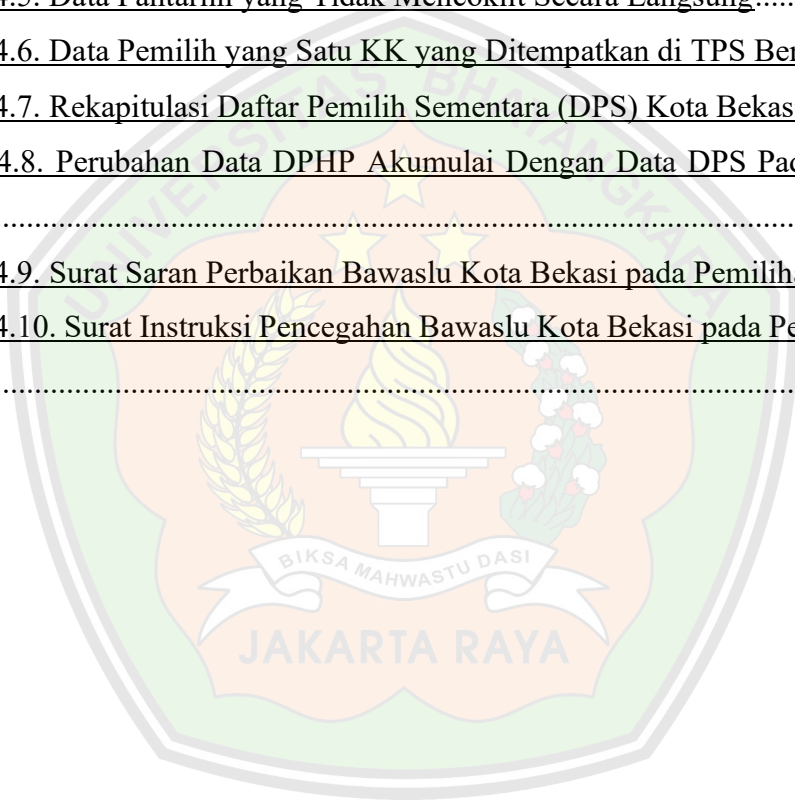
HALAMAN SAMPUL	<i>i</i>
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	<i>ii</i>
LEMBAR PENGESAHAN	<i>iii</i>
LEMBAR PERNYATAAN.....	<i>iv</i>
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	<i>v</i>
ABSTRAK.....	<i>vi</i>
ABSTRACT.....	<i>vii</i>
PRAKATA.....	<i>viii</i>
DAFTAR ISI.....	<i>x</i>
DAFTAR TABEL	<i>xiii</i>
DAFTAR GAMBAR.....	<i>xiv</i>
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	<i>xv</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	<i>16</i>
1.1. Latar Belakang Masalah	<i>16</i>
1.2. Rumusan Masalah.....	<i>22</i>
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	<i>22</i>
1.3.1. Tujuan Penelitian	<i>22</i>
1.3.2. Kegunaan Penelitian	<i>22</i>
1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran 23	
1.4.1. Kerangka Konseptual	<i>23</i>
1.4.2. Kerangka Teoretis	<i>25</i>
1.4.3. Kerangka Pemikiran.....	<i>29</i>
1.5. Penelitian Terdahulu	<i>29</i>
1.6. Metode Penelitian.....	<i>32</i>
1.6.1. Jenis Penelitian.....	<i>32</i>
1.6.2. Pendekatan Penelitian	<i>33</i>
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	<i>34</i>
1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	<i>35</i>
1.6.5. Metode Analisa Bahan Hukum	<i>35</i>

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI NEGARA HUKUM, TEORI PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS SERTA TEORI PENEGAKKAN HUKUM	36
2.1. Teori Negara Hukum.....	36
2.1.1. Pengertian Negara Hukum	38
2.1.2. Perkembangan Teori Negara Hukum.....	40
2.1.3. Prinsip Dasar Negara Hukum	41
2.2. Teori Pengawasan dan Akuntabilitas	43
2.2.1. Pengertian Pengawasan.....	43
2.2.2. Konsep Akuntabilitas.....	45
2.2.3. Teori-Teori Pengawasan dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pilkada	46
2.3. Kewenangan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada.....	46
2.4. Teori Hukum Progresif	48
2.4.1. Hukum Progresif.....	48
2.4.2. Relevansi Hukum Progresif terhadap Penanganan Pelanggaran Pilkada.....	49
2.4.3. Konsep Dasar Hukum Progresif dalam Praksis Pemilu	49
2.4.4. Kewenangan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada	50
BAB III KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH.....	53
3.1. Kewenangan Bawaslu Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 	53
3.1.1. Kewenangan Bawaslu dalam Undang-Undang Pemilu	55
3.1.2. Kewenangan Bawaslu dalam Peraturan Bawaslu	58
3.2. Independensi Bawaslu	61
3.3. Perbandingan Kewenangan Election Management Bodies di Beberapa Negara	66
BAB IV PENANGANAN PELANGGARAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SOLUSI SERTA KONSEP IDEAL PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU).....	74

4.1. Analisis Dinamika Penanganan Pelanggaran Pilkada Kota Bekasi....	74
4.1.1. Penanganan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah	79
4.1.2. Implementasi Kewenangan BAWASLU dalam Penanganan Pelanggaran	85
4.1.3. Tahapan Penanganan Pelanggaran Pemilu oleh BAWASLU	86
4.1.4. Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dan Solusi Terhadap Regulasi Penyusunan Daftar Pemilih pada Pilkada tahun 2024	87
4.1.5. Tindak Lanjut Bawaslu Kota Bekasi Berdasarkan Temuan	93
4.1.6. Kasus Pelanggaran DPT di Kota Bekasi Ditinjau dari Perspektif Hukum	94
4.2. Identifikasi Faktor Penghambat dalam Proses Penanganan Pelanggaran DPT Kota Bekasi	97
4.2.1. Langkah-Langkah Progresif Bawaslu	97
4.2.2. Kendala Penanganan DPT	97
4.2.3. Implikasi Pelanggaran DPT dalam Pilkada.....	97
4.2.4. Refleksi: Antara Legalitas dan Legitimitas dalam Pelanggaran DPT .	98
BAB V PENUTUP.....	108
5.1. Kesimpulan	108
5.2. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN.....	116
HASIL PLAGIASI CHECKER.....	116
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	117

DAFTAR TABEL

<u>Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu</u>	30
<u>Tabel 4.1. Jenis Pelanggaran Pemilihan</u>	77
<u>Tabel 4.2. Penanganan Pelanggaran dalam Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017..</u>	81
<u>Tabel 4.3. Penanganan Pidana dalam Peraturan Bersama Pemilihan</u>	84
<u>Tabel 4.4. Data Pemilih Memenuhi Syarat Tapi Tidak Masuk ke Dalam Daftar Pemilih</u>	88
<u>Tabel 4.5. Data Pantarlih yang Tidak Mencoklit Secara Langsung.....</u>	88
<u>Tabel 4.6. Data Pemilih yang Satu KK yang Ditempatkan di TPS Berbeda</u>	88
<u>Tabel 4.7. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Bekasi</u>	88
<u>Tabel 4.8. Perubahan Data DPHP Akumulai Dengan Data DPS Pada Pemilihan 2024.....</u>	89
<u>Tabel 4.9. Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kota Bekasi pada Pemilihan 2024....</u>	90
<u>Tabel 4.10. Surat Instruksi Pencegahan Bawaslu Kota Bekasi pada Pemilihan 2024</u>	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka penelitian.....	29
Gambar 2.1. Alur Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.....	51
Gambar 3.1. Daftar Lembaga Negara Berdasarkan Payung Hukumnya.....	63



HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Siapa yang menempuh jalan untuk mempelajari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.” **(HR Muslim, no. 2699).**

“Jika kamu tidak sanggup menahan beratnya jalan mempelajari ilmu maka kamu akan merasakan perihnya kebodohan” **(Imam Syafi’i)**

Tesis ini saya persembahkan untuk yang spesial yaitu Orang tua, Istri dan Anak-anak serta masyarakat Indonesia pada umumnya